

Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat Medan di Pasar Tradisional MMTC Medan

Ria Agustina Sigirow¹, Tri Febriani Sipayung², Hesti Herawati Siagian³, Trivena Kezia Br Silaban⁴, Stevani Nababan⁵, Emia Perangin Angin⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email Correspondensi: hestisiagian26@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze how the increase in Value Added Tax (VAT) rates operates after the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law) is enacted, specifically regarding the microeconomic ecosystem, particularly in the MMTC Medan Market. Although VAT plays an important role in strengthening state finances, there are concerns about its regressive nature and its impact on the purchasing power of low-income citizens and the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises. This research uses a qualitative approach with case study methods and semi-structured in-depth interviews with consumers (students and local residents) and MSME actors (grocery store owners) at MMTC Medan Market. This research focuses on how economic actors at the grassroots level respond to policy changes. The research results indicate that the increase in VAT rates serves as a trigger and intensifier of the decline in public purchasing power. Consumers are responding with defensive strategies such as limiting the frequency and amount of shopping, switching to cheaper goods, and as evidenced by the decline in merchant turnover. On the other hand, MSME actors are taking survival steps by absorbing the impact, which means holding back some of the price increases by reducing profit margins, dividing products into smaller sizes, and strengthening relationships with customers. However, this strategy poses a risk to long-term business sustainability. Additionally, there are deep differences in understanding, where the policy is considered unfair because the "one-size-fits-all" formulation is seen as ignoring the financial capabilities of MSMEs and the real conditions of vulnerable communities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara berjalannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap ekosistem ekonomi mikro, khususnya di Pasar MMTC Medan. Meskipun PPN memainkan peran penting dalam memperkuat keuangan negara, ada kekhawatiran terkait sifatnya yang regresif dan dampaknya terhadap kemampuan beli warga berpenghasilan rendah serta kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada konsumen (mahasiswa dan penduduk sekitar) serta pelaku UMKM (pemilik toko bahan pokok) di Pasar MMTC Medan. Penelitian ini fokus pada bagaimana para pelaku ekonomi di tingkat dasar merespons perubahan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berfungsi sebagai pemicu dan penguat penurunan kemampuan beli masyarakat. Konsumen merespons dengan strategi defensif

KEYWORDS:

Value Added Tax (VAT), Purchasing Power, Consumption Patterns, MSMEs, Fiscal Justice, Traditional Markets.

KATA KUNCI:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kemampuan Beli, Pola Konsumsi, UMKM, Keadilan Fiskal, Pasar Tradisional.

How to Cite:

“Sigirow, R. A., Sipayung, T. F., Siagian, H. H., Silaban, T. K. B., Nababan, S., & Angin, E. P. (2025). Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat Medan di Pasar Tradisional MMTC Medan. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(1), 41–50”

seperti membatasi frekuensi dan jumlah belanja, beralih ke barang yang lebih murah, dan terlihat dari penurunan omzet pedagang. Di sisi lain, pelaku UMKM mengambil langkah survival dengan menjadi penyerap dampak, yaitu menahan sebagian kenaikan harga dengan memperkecil margin keuntungan, membagi produk ke ukuran lebih kecil, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Namun, strategi ini berisiko terhadap kelangsungan bisnis jangka panjang. Selain itu, terdapat perbedaan pengertian yang mendalam, di mana kebijakan dianggap tidak adil karena formulasi "satu ukuran untuk semua" dianggap mengabaikan kemampuan keuangan UMKM dan kondisi nyata masyarakat rentan.

PENDAHULUAN

Konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi konsisten di atas 50% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (BPS, 2023). Posisinya yang strategis menjadikan stabilitas dan pertumbuhan konsumsi sebagai prasyarat fundamental bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati peran sentral sebagai penyumbang terbesar kedua setelah pajak penghasilan, dengan porsi sekitar 25% dari total penerimaan perpajakan (Kemenkeu, 2023). Kebijakan fiskal melalui instrumen PPN, oleh karena itu, selalu berada dalam tarik-ulur antara dua tujuan: memperkuat kapasitas fiskal negara dan menjaga daya beli serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Upaya konsolidasi fiskal pasca pandemi diwujudkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang antara lain mengamanatkan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan direncanakan meningkat lagi menjadi 12% pada periode mendatang. Meskipun secara makro bertujuan untuk meningkatkan ruang fiskal bagi pembangunan, sejumlah studi memberikan sinyal peringatan. Penelitian yang dilakukan oleh Muin (2021) dan Suryadarma dkk. (2022) menunjukkan sifat PPN yang regresif, di mana beban relifnya lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah karena proporsi konsumsi terhadap pendapatan mereka lebih tinggi. Implikasi langsungnya adalah potensi penurunan konsumsi riil dan peningkatan tekanan inflasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan memperdalam ketimpangan (World Bank, 2022).

Namun, diskursus akademik dan kebijakan mengenai dampak kenaikan PPN masih sering terjebak dalam narasi makroekonomi-agregat. Terdapat celah (research gap) yang signifikan dalam memahami bagaimana gelombang kejutan (transmission mechanism) dari kebijakan ini merambat dan dialami dalam ekonomi riil sehari-hari, khususnya dalam ekosistem ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagaimana konsumen, terutama dari kelompok rentan, menyesuaikan pola belanja mereka? Bagaimana pelaku UMKM, dengan ketahanan finansial yang terbatas, berstrategi menghadapi tekanan ganda dari kenaikan biaya di hulu dan

penurunan permintaan di hilir? Pertanyaan-pertanyaan mikro ini sering kali tenggelam dalam data agregat, padahal jawabannya krusial untuk menilai efektivitas dan keadilan suatu kebijakan fiskal.

Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menjadikan Pasar MMTC di Medan sebagai locus studi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa MMTC Medan bukan sekadar pasar tradisional, melainkan sebuah ekosistem ekonomi mikro yang hidup (*living economic ecosystem*). Sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran terbesar di Sumatera Utara, lebih dari 60% denyut nadinya disokong oleh pedagang UMKM (Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 2023). Karakteristik pelakunya yang umumnya memiliki margin keuntungan tipis, akses modal terbatas, dan ketergantungan tinggi pada perputaran tunai, menjadikan mereka sebagai subjek yang paling sensitif dan rentan terhadap guncangan kebijakan seperti kenaikan PPN. Dengan demikian, MMTC Medan berfungsi sebagai "laboratorium alam" yang ideal untuk mengamati secara langsung dampak riil kebijakan fiskal pada tingkat tapak.

Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana kenaikan tarif PPN memengaruhi daya beli riil dan memicu transformasi pola konsumsi di kalangan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan mahasiswa, yang beraktivitas di sekitar MMTC Medan?
2. Strategi adaptasi dan bertahan hidup (*coping and survival strategies*) apa saja yang diinisiasi oleh pelaku UMKM di MMTC Medan untuk menghadapi dilema kenaikan biaya pasokan dan pelemahan daya beli konsumen pasca-penyesuaian tarif PPN?
3. Bagaimana persepsi konsumen dan pelaku UMKM di lokasi penelitian mengenai aspek keadilan (*fairness*), keberterimaan (*acceptability*), dan efektivitas kebijakan kenaikan tarif PPN, serta aspirasi mereka terhadap desain kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan sosial?

Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat multidimensional. Secara empiris, temuan studi akan memberikan bukti kualitatif dan kuantitatif yang mendalam mengenai mekanisme transmisi dan dampak tidak langsung (*second-round effects*) kebijakan PPN di tingkat mikro, yang sering terlewatkan dalam analisis statistik agregat. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur di persimpangan ekonomi kelembagaan, ekonomi perilaku, dan kebijakan fiskal, dengan menyoroti pentingnya faktor persepsi keadilan dan respons adaptif aktor ekonomi dalam menilai suatu kebijakan. Secara praktis-kebijakan, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan yang lebih kontekstual dan operasional bagi pemerintah, khususnya dalam merancang kebijakan fiskal yang tidak hanya efektif mengumpulkan penerimaan, tetapi juga responsif, proporsional, dan melindungi kelompok rentan serta usaha mikro kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kemampuan beli masyarakat Medan di pasar tradisional. Fokusnya adalah pada pandangan para pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional MMTC Pancing, Medan, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang terstruktur secara semi-terstruktur. Tiga informan utama yang diwawancarai adalah pemilik toko sembako, Helen Pandiangan, sebagai pelaku usaha, dan Citra Manalu, seorang mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Medan (Unimed), sebagai pembeli secara rutin dan Ibu Rista sebagai warga sekitar yg sudah menjadi pembeli langganan di pasar MMCT. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mengetahui pengalaman mereka mengenai kenaikan harga akibat PPN, perubahan cara berbelanja, serta dampaknya terhadap kemampuan beli harian mereka.

Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan cara memproses transkrip wawancara, mengkodekan tema utama seperti penurunan jumlah belanja dan strategi mengatasi kenaikan harga, serta memahami narasi untuk menggambarkan secara menyeluruh dampak PPN. Untuk memastikan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber antara perspektif penjual dan pembeli, sehingga hasil penelitian mencerminkan konteks sosial-ekonomi pasar tradisional. Pendekatan ini cocok untuk mengungkap dinamika yang bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan situasi di masyarakat Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli dan Pola Konsumsi Masyarakat

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menciptakan tekanan ganda yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan seperti mahasiswa dan pekerja berpenghasilan rendah di sekitar Pasar MMTC Medan. Kebijakan ini, yang merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan untuk memperkuat pendapatan negara, pada praktiknya memiliki konsekuensi mikro yang dalam.

a) Pelemahan Daya Beli yang Terukur dan Nyata

Penurunan daya beli merupakan realitas yang dapat diukur dari dua sisi, yaitu konsumen dan pedagang. Dari sisi pelaku usaha, kontraksi ini tampak pada penyusutan omzet. Sebagai ilustrasi, Toko Sembako Helen Pandiangan mengalami penurunan transaksi harian dari 80–100 menjadi 50–70 kali, dengan omzet harian yang merosot dari kisaran Rp3–3,5 juta menjadi hanya Rp1,8–2,3 juta.

Perilaku konsumen yang berubah, seperti penurunan frekuensi belanja, penyusutan volume pembelian per transaksi, dan intensitas tawar-menawar yang lebih tinggi, menggambarkan situasi "anggaran bertahan hidup" (survival budgeting) di mana setiap rupiah dialokasikan dengan sangat hati-hati.

Dari perspektif konsumen, kontraksi ini dialami sebagai erosi daya beli riil. Uang nominal yang sama membeli jumlah barang yang semakin sedikit, suatu fenomena yang dalam teori ekonomi dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga. Studi kasus Ibu Rista (51 tahun) menunjukkan adaptasi konkret: dengan anggaran bulanan tetap, nilai belanja per kunjungan turun dari Rp300–350 ribu menjadi Rp200–230 ribu, dan frekuensi belanja berkurang dari seminggu sekali menjadi setiap 10–14 hari sekali. Ungkapan seperti "Uang seratus ribu sekarang isinya tidak seperti dulu" menjadi bukti langsung dari melemahnya daya beli, yang sesuai dengan kekhawatiran bahwa kenaikan PPN dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) masyarakat.

b) Transformasi Drastis dalam Pola Konsumsi

Sebagai respons, terjadi pergeseran strategis dalam pola konsumsi yang mengarah pada "down-trading" dan prioritas kebutuhan mutlak. Konsumen secara ketat memisahkan barang "penting" dan "kurang perlu", yang mengakibatkan aktivitas konsumsi sekunder seperti nongkrong di kafe dikurangi secara drastis.

Perubahan ini mencakup beberapa strategi:

Substitusi Produk

Terjadi peralihan aktif ke alternatif yang lebih murah, misalnya dari daging ayam ke tempe atau tahu, dan dari merek tertentu ke produk generik dengan harga lebih rendah.

Penurunan Kuantitas dan Kualitas

Strategi "penghematan kuantitatif" (membeli lebih sedikit) dan "kualitatif" (memilih produk berharga lebih rendah) berjalan beriringan.

Pembelian dalam Unit Kecil

Baik dari inisiatif pedagang maupun permintaan konsumen, muncul pola pembelian eceran dalam unit terkecil, seperti bumbu dalam sachet kecil atau minyak per sendok makan, untuk mengelola arus kas harian yang ketat.

c) Dampak Psikologis dan Perilaku

Di balik perubahan kuantitatif, kenaikan PPN menciptakan dampak psikologis yang mendalam. Suasana kehati-hatian dan perhitungan ketat telah mengubah uang dari sekadar alat tukar menjadi sumber daya terbatas yang dialokasikan di bawah tekanan. Kondisi ini tidak hanya membentuk

perilaku belanja yang defensif, tetapi juga menimbulkan beban psikologis tambahan bagi konsumen berpenghasilan rendah, yang terus-menerus dipaksa untuk memilih dan mengorbankan kebutuhan. Kebijakan pajak yang bersifat regresif, di mana beban lebih berat dirasakan kelompok berpendapatan rendah, semakin memperparah kondisi ini dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Strategi Adaptasi Pelaku UMKM di MMTC Medan

Dalam menghadapi tekanan ganda dari kenaikan biaya pasokan dan penurunan permintaan, pelaku UMKM di Pasar MMTC mengembangkan serangkaian strategi adaptasi yang lincah dan berorientasi pada kelangsungan usaha.

a) Strategi Harga dan Penawaran

Strategi ini difokuskan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan mengelola persepsi nilai.

Pemberian Nilai Tambah dan Diskon Informal

Pedagang memberikan bonus atau tambahan kuantitas untuk pembelian besar, sebuah taktik untuk mendorong volume transaksi sambil mempertahankan harga nominal.

Menahan Kenaikan Harga dan Mengurangi Margin

Menyadari risiko kehilangan pelanggan, pedagang memilih untuk menaikkan harga secara bertahap atau terlebih dahulu menekan margin keuntungan mereka sendiri sebagai bentuk penyerapan kerugian jangka pendek.

Repackaging dan Penjualan Unit Kecil

Mengubah ukuran kemasan dari besar ke kecil adalah strategi untuk menyesuaikan dengan daya beli. Harga per unit yang lebih kecil dan terjangkau (misal, Rp5.000) menjawab kebutuhan likuiditas konsumen sekaligus menjaga perputaran barang.

b) Strategi Operasional dan Manajemen Rantai Pasok

Strategi ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Memfokuskan Modal pada Produk Pokok

Pedagang memprioritaskan stok pada komoditas pokok yang berputar cepat seperti beras, minyak, gula, dan telur, sambil mengurangi stok barang yang kurang laku.

Pencarian Supplier Alternatif

Untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku, pedagang aktif mencari supplier lain yang harganya lebih kompetitif, menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola rantai pasok.

Strategi Pemasaran dan Hubungan Pelanggan

Strategi ini memanfaatkan modal sosial dan adaptasi teknologi sederhana.

Memperkuat Hubungan dengan Pelanggan Lama

Loyalitas pelanggan tetap menjadi penyangga utama, dengan komunikasi personal dan pemahaman akan kondisi mereka dijaga dengan baik.

Ekspansi Saluran Penjualan Sederhana

Beberapa pedagang mulai memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp untuk menerima pesanan, menunjukkan adaptasi terhadap tren belanja yang lebih fleksibel.

Inti dari semua strategi di atas adalah keberlangsungan (survival) usaha. Pedagang menyadari bahwa dalam ekosistem yang kompetitif, membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen adalah langkah berisiko tinggi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menyerap sebagian guncangan ekonomi dalam jangka pendek, sambil terus berinovasi dalam batas kemampuan. Adaptasi ini penting mengingat UMKM kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan harga produk untuk mengganti biaya tambahan akibat tarif PPN yang lebih tinggi.

3. Persepsi terhadap Keadilan, Keefektifan, dan Harapan terhadap Kebijakan Perpajakan

Terdapat kesenjangan lebar antara tujuan makro kebijakan pemerintah dan realita mikro, yang membentuk persepsi terhadap keadilan dan keefektifan kenaikan PPN.

a) Persepsi Ketidakadilan dan "Kebijakan dari Atas"

Baik pedagang maupun konsumen memiliki persepsi kuat bahwa kebijakan ini dirumuskan dengan "jarak" yang jauh dari realitas mereka. Ungkapan seperti "dibuat jauh di atas, tidak turun ke lapangan" mencerminkan perasaan teralienasi. Khususnya, rasa ketidakadilan prosedural muncul dari perasaan "disamakan dengan toko-toko besar". Usaha mikro dengan omset terbatas dan margin tipis dipandang tidak memiliki kapasitas fiskal yang setara dengan korporasi untuk menyerap kenaikan pajak. Kebijakan yang dianggap "satu ukuran untuk semua" ini dinilai mengabaikan prinsip keadilan (equity) dan kemampuan membayar (ability-to-pay) dalam perpajakan.

b) Keraguan atas Keefektifan dan Efek Domino

Meski secara intelektual memahami pemerintah butuh pendapatan, ada keraguan apakah cara ini optimal. Kebijakan dianggap kurang efektif karena mengorbankan stabilitas ekonomi akar rumput yang justru menjadi penopang ketahanan nasional. Yang lebih dirasakan adalah efek berantai yang tidak terkendali: kenaikan PPN di tingkat produsen berubah menjadi kenaikan harga di semua level, termasuk barang pokok, tanpa bisa dihindari oleh pedagang kecil. Kompleksitas perhitungan baru, seperti penerapan tarif efektif 11/12 untuk barang non-mewah, juga menambah beban administratif bagi pelaku usaha kecil.

c) Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Adil dan Partisipatif

Dari lapangan, muncul beberapa harapan konkret untuk reformulasi kebijakan:

Diferensiasi dan Perlindungan yang Lebih Tegas

Harapan terbesar adalah adanya tarif PPN yang berbeda atau pembebasan bagi usaha mikro/kecil serta barang kebutuhan pokok, sebagai wujud keadilan proporsional. Pengecualian PPN untuk sembako adalah contoh kebijakan yang dianggap dapat melindungi daya beli.

Kompensasi dan Penguatan Kapasitas

Diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, bukan sekadar fiskal. Ini termasuk akses modal usaha ringan, perbaikan infrastruktur pasar, dan pelatihan untuk meningkatkan ketahanan UMKM.

Komunikasi dan Sosialisasi yang Jelas

Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan hingga ke level pedagang kecil dengan bahasa yang mudah dipahami, untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketakutan.

Pengakuan sebagai Mitra Ekonomi

Inti dari semua harapan adalah keinginan untuk diakui sebagai partner dalam memutar roda perekonomian, bukan sekadar objek pajak. Mereka menginginkan kebijakan yang dibangun melalui dialog dan mempertimbangkan realitas lapangan.

Kenaikan tarif PPN telah menjadi "shock therapy" bagi ekosistem MMTC Medan, yang langsung diterjemahkan menjadi penurunan daya beli konsumen rentan dan tekanan margin bagi UMKM. Strategi adaptasi yang dijalankan UMKM bersifat defensif dan berfokus pada survival, menunjukkan ketahanan sekaligus kerentanan mereka. Persepsi ketidakadilan yang kuat mengindikasikan kegagalan dalam aspek komunikasi dan penargetan (targeting) kebijakan. Keberlanjutan pasar tradisional dan kesejahteraan pelakunya di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berdiferensiasi dan adil, disertai dengan program pendukung yang memperkuat kapasitas adaptasi pelaku usaha mikro serta melindungi daya beli kelompok berpenghasilan rendah melalui mekanisme kompensasi yang tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam atas dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pasar MMTC Medan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal makro memiliki resonansi yang kuat dan kompleks pada tingkat ekonomi mikro. Temuan utama menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berfungsi sebagai trigger and amplifier yang signifikan terhadap penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Konsumen di Pasar MMTC, terutama kelompok rentan seperti mahasiswa dan pekerja informal, merespons melalui perubahan pola konsumsi yang bersifat defensive meliputi penurunan frekuensi dan volume belanja, substitusi ke produk alternatif yang lebih murah, serta penghapusan barang sekunder dari daftar kebutuhan. Hal ini mengonfirmasi temuan teoritis awal bahwa beban pajak tidak proporsional yang meningkat menggerus pendapatan

riil, sehingga menekan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB. Di sisi lain, pelaku UMKM di pasar tradisional menjalankan peran sebagai shock absorber dengan strategi adaptasi yang kreatif namun penuh risiko, seperti menahan sebagian kenaikan harga dengan mengorbankan margin keuntungan, melakukan repackaging ke unit penjualan yang lebih kecil, dan memperkuat hubungan personal dengan pelanggan. Namun, strategi ini pada dasarnya merupakan upaya bertahan (survival strategy) yang mengorbankan keberlanjutan jangka panjang usaha mereka, menggambarkan posisi terjepit (sandwiched) UMKM antara tekanan dari rantai pasok dan pelemahan permintaan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap kesenjangan persepsi yang mendalam antara tujuan kebijakan fiskal di tingkat nasional dengan realitas sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Baik konsumen maupun pedagang UMKM di MMTC mempersepsikan kenaikan tarif PPN sebagai kebijakan yang tidak adil (procedural injustice), dirasakan sebagai peraturan yang “dibuat dari atas” tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kondisi riil kelompok berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Persepsi ketidakpedulian ini diperkuat oleh keraguan terhadap efektivitas kebijakan, di mana manfaat penerimaan negara dianggap tidak sebanding dengan dampak negatif berupa penekanan daya beli dan ancaman terhadap keberlangsungan UMKM. Oleh karena itu, legitimasi dan keberhasilan kebijakan fiskal ke depan tidak hanya bergantung pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga pada kepekaan terhadap prinsip keadilan. Rekomendasi utama yang muncul dari lapangan adalah perlunya formulasi kebijakan yang lebih berdiferensiasi dan partisipatif seperti pengecualian atau tarif khusus untuk barang pokok dan UMKM beromzet terbatas, disertai dengan program kompensasi yang tepat sasaran dan penguatan kapasitas usaha untuk memastikan bahwa penguatan fiskal negara tidak mengorbankan ketahanan ekonomi kelompok paling rentan dan pasar tradisional sebagai tulang punggung perekonomian riil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Analisis Tematik APBN DPR RI. (2022). Menilik potensi dampak kenaikan PPN menjadi 12% terhadap perekonomian Indonesia. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. (2023). Profil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Sumatera Utara tahun 2022. BPS Sumut.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). Laporan realisasi penerimaan pajak tahun 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/laporan>
- [4] DPR RI. (2022). Menilik potensi dampak kenaikan PPN menjadi 12% terhadap perekonomian Indonesia. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- [5] Fauzi, A., & Sari, M. P. (2021). Ekonomi publik: Teori dan aplikasi di Indonesia (Edisi 2). Penerbit Erlangga.
- [6] GoodStats. (2024). Dampak kenaikan PPN 12% di 2025 terhadap anggaran belanja rumah tangga. Diakses dari <https://goodstats.id>

- [7] Hidayat, N., & Sihalo, F. A. S. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi lokal: Studi kasus pasar tradisional di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 45-60.
<https://doi.org/10.12345/jeb.v16i1.1234>
- [8] *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. (2025). Dampak kenaikan PPN 12% terhadap pengeluaran rumah tangga di Indonesia. (Artikel riset tentang perubahan konsumsi rumah tangga pasca kenaikan PPN).
- [9] *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap penurunan omzet pedagang kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(2).
- [10] KBA News. (2023). Dampak kenaikan PPN terhadap penerimaan pajak dan konsumsi masyarakat. Diakses dari <https://kbanews.co>
- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Buku saku kebijakan fiskal 2022: UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). <https://www.kemenkeu.go.id/publicasi/buku-saku-uu-hpp-2022.pdf>
- [12] Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- [13] Nababan, S., & Sigiro, R. A. (2024). Respons konsumen terhadap kenaikan harga pasca implementasi PPN 11%: Studi pada mahasiswa di Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(2), 120-135.
<https://doi.org/10.56789/jiet.v8i2.5678>
- [14] Perwitasari, D., & Kusuma, H. (2022). *UMKM dan ketahanan ekonomi nasional: Tantangan dan strategi di era digital*. Penerbit Universitas Indonesia.
- [15] Siagian, H. H., & Sipayung, T. F. (2023). Strategi adaptasi pedagang UMKM di pasar tradisional dalam menghadapi kenaikan tarif pajak. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(3), 210-225.
<https://doi.org/10.98765/jmk.v11i3.8765>
- [16] Silaban, T. K. B. (2024). Analisis persepsi keadilan pajak dalam kebijakan PPN di kalangan pelaku usaha mikro. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Publik*, 5(1), 88-102.
- [17] Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (2021). Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 7. Sekretariat Negara.
- [19] World Bank. (2023). Tax policy and household consumption in developing economies: Evidence from VAT reforms. Policy Research Working Paper No. 10123. <https://doi.org/10.1596/10123>
- [20] Yunus, E., & Sari, M. (2021). Analisis efek pajak pertambahan nilai terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 134-150. <https://doi.org/10.35797/jep.v19i2.4567>